



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JUNI 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 30 Juni 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 284 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	TIM	File	Perwakilan	
15	4		80	21	73	22		37	32	284

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	7	20	Kalimantan Barat	3
2	Sumatera Utara	28	21	Kalimantan Selatan	2
3	Bengkulu	3	22	Kalimantan Tengah	10
4	Jambi	1	23	Kalimantan Timur	7
5	Riau	8	24	Kalimantan Utara	
6	Sumatera Barat	11	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	11	26	Sulawesi Selatan	5
8	Lampung	1	27	Sulawesi Tenggara	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	9
10	Kepulauan Riau	2	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	5	30	Sulawesi Barat	
12	Jawa Barat	19	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	44	32	Maluku	37
14	Jawa Tengah	16	33	Maluku Utara	
15	Jawa Timur	21	34	Papua	5
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	6	35	Papua Barat	
17	Bali	2	36	Tanpa Alamat	8
18	Nusa Tenggara Barat	2			
19	Nusa Tenggara Timur	4		Jumlah	284

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	138
2	Subkomisi mediasi	28
3	TIM	
4	File	118
Jumlah		284

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	105
2	Tembusan	179
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	
Jumlah		284

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	19
2	Pos	248
3	Fax	3
4	Email	10
5	Online	1
6	Audiensi	1
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	2
8	Jejaring	
Jumlah		284

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	7
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
3	Hak mengembangkan diri	2
4	Hak memperoleh keadilan	83
5	Hak atas kebebasan pribadi	3
6	Hak atas rasa aman	16
7	Hak atas kesejahteraan	105
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	61
Jumlah		284

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	1
Lingkungan hidup	6
	7
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	2
	2
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas

Hak atas pendidikan	2
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
	2
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	71
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	1
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	11
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	
	83
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	1
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	
Berkumpul, berapat, dan berserikat	
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	3
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	1
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	6
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	6
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	1
	14
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas

Hak untuk mempunyai milik	3
Hak atas kepemilikan tanah	45
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	17
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	12
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	21
Hak atas kesehatan	3
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
	103
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	
	3
IX. Hak perempuan	
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
	1
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	1
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	61
Jumlah Seluruh	280

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	126
2	Individu - Anak	3
3	Individu - Perempuan	7
4	Individu - Buruh migran	1
5	Individu - Pekerja/Profesi	19
6	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
7	Individu - Lansia	3
8	Individu - Narapidana	1
9	Kelompok - Masyarakat	59
10	Kelompok - Pekerja	4
11	Kelompok - Masyarakat Adat	5
12	Kelompok - Ras dan Etnis	2
13	Kelompok - Agama dan penganut kepercayaan	2
14	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
15	Kelompok - Narapidana	1
16	Organisasi	2
17	Warga Negara Asing (WNA)	1
18	Tanpa Keterangan Pihak Korban	46

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	19
2	Pemerintah daerah	31
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	5
5	Lembaga peradilan	16
6	POLRI	81
7	TNI	9
8	Kejaksaan	5
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	2
10	Pemerintah negara lain	
11	Korporasi	41
12	BUMN/BUMD	7
13	Lembaga pelayanan kesehatan	1

14	Lembaga pendidikan	7
15	Individu - Orang seorang	5
16	Individu - Pekerja/Profesi	1
17	Kelompok - Masyarakat	3
18	Organisasi	2
19	Warga Negara Asing (WNA)	1
20	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	48

Jakarta, 2 Juli 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim